

ANALISIS KEBIJAKAN DAN REGULASI PENDIDIKAN DAYAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019: STUDI KASUS DI DAYAH ZURRIYATUL QUR'AN AL-MAARIF

Ulfanur¹, Agus Salim Salabi², Nurmayuli³

^{1,2} UIN Sulthanah Nahrasiyah, Lhokseumawe

³ UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Email kontributor: ulfanurmuhammad9@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dan regulasi pendidikan dayah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, dengan studi kasus pada Dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari 10 informan terdiri dari pimpinan dayah, pengurus lembaga, 2 orang guru (teungku), 3 orang santri senior, serta 2 orang pihak Badan Dayah Aceh (BDA) yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan dan pembinaan lembaga dayah. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif telah mengimplementasikan sebagian besar ketentuan regulatif dalam UU Pesantren dan Qanun Dayah Aceh, terutama dalam hal tata kelola lembaga, kurikulum, dan kerja sama kelembagaan dengan Badan Dayah Aceh (BDA). Regulasi tersebut memberikan pengakuan hukum dan penguatan kelembagaan bagi dayah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan Islam di Aceh. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, pendanaan, dan adaptasi kurikulum yang perlu mendapat perhatian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah telah menciptakan model pendidikan Islam yang harmonis antara nilai tradisional dan sistem pendidikan modern.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, Undang-undang Nomor 18 tahun 2019, Regulasi Pendidikan Dayah, Peraturan Pesantren, dan Qanun Aceh

Abstract

This study aims to analyse the implementation of dayah education policies and regulations based on Law Number 18 of 2019 concerning Pesantren and Aceh Qanun Number 9 of 2018 concerning the Organisation of Dayah Education, with a case study at Dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif. This research uses a descriptive qualitative approach with a case study type, through data collection techniques including in-depth interviews, participatory observation, and document study. The research subjects consist of 10 informants, including dayah leaders, institutional administrators, 2 teachers (teungku), 3 senior students, and 2 officials from the Aceh Dayah Agency (BDA) who are related to dayah policy and development. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. It concluded that the synchronization between national and regional policies has created an educational model of research results indicate that Dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif has implemented most of the regulatory provisions in the Pesantren Law and Aceh Dayah Qanun, particularly in terms of institutional governance, curriculum, and institutional cooperation with the Aceh Dayah Agency (BDA). These regulations provide legal recognition and institutional strengthening for the dayah as an integral part of the Islamic education system in Aceh. However, there are still challenges such as limited human resources, funding, and curriculum adaptation that need attention. The study concludes that the synchronization between national and regional policies has created a model of Islamic education that harmonises traditional values with the modern education system.

Keywords: Education Policy, Law Number 18 of 2019, Dayah Education Regulations, Pesantren Regulations, and Aceh Qanun.

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia memiliki akar historis yang kuat dan memainkan peranan strategis dalam pembentukan peradaban bangsa. Sejak masa awal Islamisasi Nusantara, lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren atau dayah di Aceh telah berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu agama, dakwah, dan pembentukan karakter umat (Azra, 2012). Dayah tidak hanya menjadi tempat belajar ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga lembaga sosial yang membentuk nilai-nilai kejujuran, kemandirian, dan kepemimpinan spiritual di masyarakat (Abdullah, 2020).

Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan modernisasi pendidikan, sistem pendidikan dayah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Pemerintah Indonesia menunjukkan perhatian serius terhadap eksistensi pesantren

melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini menegaskan bahwa pesantren merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang memiliki fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Hukum dan HAM, 2019). Melalui regulasi ini, pesantren diberikan kedudukan hukum yang jelas, termasuk dalam pengelolaan kurikulum, pendanaan, dan pengakuan terhadap lulusan.

Sementara itu, sebagai daerah dengan kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan syariat Islam, Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Kementerian Hukum dan HAM, 2019). Qanun ini merupakan bentuk konkret otonomi khusus Aceh dalam bidang pendidikan Islam yang berfungsi memperkuat sistem pendidikan dayah secara kelembagaan, administratif, dan kurikuler (Pemerintah Aceh, 2018). Qanun tersebut juga mengatur mekanisme pembinaan, akreditasi, serta pembiayaan pendidikan dayah melalui lembaga resmi seperti Badan Dayah Aceh (BDA).

Namun demikian, implementasi regulasi dan kebijakan tersebut menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak dayah masih menghadapi keterbatasan dalam sumber daya manusia, tata kelola manajemen, serta penyesuaian kurikulum dengan kebijakan nasional (Siregar, F., & Rahman, 2021). Di sisi lain, beberapa lembaga dayah telah berupaya mengintegrasikan sistem pendidikan tradisional dengan kebijakan modern tanpa menghilangkan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khasnya (Andriani, et al., 2022), selanjutnya Peran dayah didalam masyarakat sebagai pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengelolaan wakaf, koperasi syariah, dan kemitraan dengan usaha lokal, serta menyediakan pelatihan keterampilan praktis (Riadhi, 2024). Dari ketiga penelitian terdahulu belum ada penelitian tentang analisis kebijakan undang-undang nomor 18 tahun 2019 dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018 tentang dayah dan sejauh mana implementasi pada dayah yang ada, sehingga penelitian ini menjadi hal penting untuk menganalisis kebijakan yang sudah ada.

Berdasarkan observasi awal, Dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif, yang dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam berbasis tahfiz dan ilmu keislaman. Dayah ini berupaya menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2019, sembari mempertahankan tradisi pendidikan dayah klasik. Dengan demikian, studi kasus pada lembaga ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana kebijakan dan regulasi diterapkan secara praktis di tingkat lembaga.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan regulasi pendidikan dayah dalam kerangka hukum nasional dan daerah, serta melihat sejauh mana implementasinya berpengaruh terhadap sistem manajemen, kurikulum, dan visi-misi pendidikan di Dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif. Kajian ini diharapkan

dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan Islam yang kontekstual, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat Aceh serta kebijakan pendidikan nasional di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus (*case study research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan dan regulasi pendidikan dayah dalam konteks sosial dan kelembagaan yang spesifik (Creswell, J. W., & Creswell, 2017). Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat menelusuri makna, pengalaman, serta dinamika penerapan kebijakan pendidikan di Dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif secara kontekstual dan holistik.

Studi kasus dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji fenomena secara mendalam pada satu lokasi penelitian dengan fokus pada penerapan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi terhadap kebijakan, strategi, serta praktik pengelolaan pendidikan dayah yang sesuai dengan karakteristik lokal (Juniati, 2023).

Subjek penelitian terdiri dari 10 informan meliputi pimpinan dayah, pengurus lembaga, 2 orang guru (teungku), 3 orang santri senior, serta 2 orang pihak Badan Dayah Aceh (BDA) yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan dan pembinaan lembaga dayah. Data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu: (1) Wawancara mendalam (*in-depth interview*) Dilakukan terhadap pimpinan dayah, pengurus, dan perwakilan santri untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan, tata kelola, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan regulasi (Data, 2014; Arianto, 2024). (2) Observasi partisipatif (*participant observation*) (Hasanah, 2016).

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas pembelajaran, manajemen lembaga, dan praktik implementasi kebijakan di lingkungan dayah. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman empiris terhadap pelaksanaan regulasi di tingkat satuan pendidikan. (3) Studi dokumentasi (*documentation study*). Data diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan pemerintah, kurikulum dayah, panduan operasional, laporan kegiatan, serta arsip kebijakan dari Badan Dayah Aceh. Dokumen tersebut digunakan untuk menelusuri kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Proses analisis dilakukan sejak awal pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, dengan prinsip triangulasi dan refleksi berkelanjutan agar hasil analisis memiliki keabsahan yang tinggi. Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data penelitian di peroleh dari 10 informan yang terdiri dari pimpinan dayah, pengurus lembaga, guru (teungku), santri senior, serta pihak Badan Dayah Aceh (BDA) yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan dan pembinaan lembaga dayah. Data dilakukan pengkodean dan uji ke absahan data dan terakhir penarikan kesimpulan, berikut tabel uraian kesimpulan hasil data penelitian.

Tabel 1. Hasil Wawancara Analisis Kebijakan dan Regulasi Pendidikan Dayah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 di Dayah **Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif**

Aspek	Temuan Penelitian
Implementasi kebijakan pendidikan	- mengadopsi sebagian besar prinsip yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah - menyelenggarakan dua jalur utama pendidikan: (1)Pendidikan formal berbasis tahfizul Qur'an, dan (2). Pendidikan diniyah tradisional yang berfokus pada kajian kitab kuning - menjalin kerjasama dengan Badan Dayah Aceh (BDA) untuk pemenuhan sarana prasaran.
Tantangan implementasi regulasi	- keterbatasan SDM - keterbatasan dana - kesulitan adaptasi kurikulum
Peran Qanun Aceh dalam Penguatan Sistem Dayah	mengatur mekanisme pembinaan oleh Badan Dayah Aceh, mulai dari penyaluran dana hibah, akreditasi, hingga pelatihan manajemen pendidikan
Sinkronisasi antara UU Pesantren dan Qanun Dayah Aceh	pengakuan formal terhadap pesantren/dayah, peningkatan mutu pendidikan keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis keislaman.
Implikasi terhadap Pengembangan Pendidikan Islam	dijadikan model transformatif bagi pengembangan dayah di Aceh dan Indonesia, seperti (1).Kepemimpinan dayah yang visioner. (2) Dukungan kebijakan daerah yang berpihak pada lembaga, dan (3) Kolaborasi antara dayah, pemerintah, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil data temuan penelitian secara keseluruhan **Dayah di Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif** telah mengimplementasikan kebijakan Pendidikan berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2019 dan qanun aceh, namun masih ditemukan kendala dilapakan dalam implementasi kebijakan berupa keterbatasan SDM, dana dan kesulitan adaptasi kurikulum. Berikut akan diuraikan secara detail hasil penelitian.

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Dayah di Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, Dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif telah mengadopsi sebagian besar prinsip yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Dari segi kelembagaan, dayah ini telah memiliki struktur manajemen yang jelas, mencakup pimpinan dayah (mudir), bagian kurikulum, keuangan, dan pembinaan santri. Struktur tersebut sejalan dengan amanat Pasal 6 UU No.18/2019 yang menekankan pentingnya tata kelola pesantren secara profesional.

Dari aspek pendidikan, dayah ini menyelenggarakan dua jalur utama: (1) Pendidikan formal berbasis tahfizul Qur'an, dan (2) Pendidikan diniyah tradisional yang berfokus pada kajian kitab kuning. Model ini merupakan bentuk integrasi sistem pendidikan klasik dan modern, yang sesuai dengan pasal 10 UU No.18/2019 mengenai penyelenggaraan pendidikan pesantren dalam tiga fungsi utama: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat (Kementerian Hukum dan HAM, 2019).

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa Dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif telah menjalin kerja sama dengan Badan Dayah Aceh (BDA) dalam hal akreditasi dan bantuan sarana prasarana. Program pelatihan guru dayah dan bantuan operasional pendidikan menjadi bukti bahwa kebijakan daerah melalui Qanun Aceh No. 9/2018 telah memberikan dukungan nyata terhadap pengembangan lembaga dayah (Pemerintah Aceh, 2018).

Upaya bantuan yang dilakukan Badan Dayah Aceh (BDA) dengan memberikan bantuan sarana prasarana dengan kondisi keuangan dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif, sebagai bentuk kontribusi dinas pendidikan dayah (Azhari, M., & Jailani, 2023). Sehingga dayah hanya butuh sumber daya pengelola yang baik dari internal dayah tersebut (Mirsal, I., Adnin, A. S., Sartina, K., Irwansuri, Z., Rusdi, M., Noviyani, R., & Akbar, 2025).

2. Tantangan Implementasi Regulasi

Meskipun kebijakan nasional dan daerah memberikan pengakuan legal dan dukungan institusional, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya belum berjalan secara optimal di tingkat lembaga. Tantangan utama yang dihadapi Dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif meliputi: (1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Beberapa tenaga pendidik belum memiliki sertifikasi profesional sebagaimana disyaratkan dalam standar pendidikan formal. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas guru dayah melalui pelatihan dan program kompetensi (Fardiyana, et al., 2024; Siregar, F., & Rahman, 2021).

(2) **Pendanaan dan kemandirian ekonomi**, walaupun dayah telah mendapatkan bantuan dari BDA, namun dana tersebut belum cukup untuk mendukung inovasi pembelajaran dan pengembangan sarana modern. Kemandirian ekonomi dayah masih bergantung pada donatur dan masyarakat sekitar, sehingga perlu strategi kewirausahaan pesantren (Abdullah, 2020).

(3) **Adaptasi kurikulum**, Implementasi kurikulum integratif antara pelajaran diniyah dan umum masih menghadapi kesenjangan, terutama dalam penyusunan standar penilaian dan penyetaraan ijazah (Lailatussaadah, et al., 2025). Hal ini menjadi isu nasional sebagaimana dikemukakan Andriani, et al., (2022), bahwa proses adaptasi kurikulum pesantren terhadap sistem pendidikan nasional memerlukan kebijakan fleksibel dan pendampingan intensif.

Ada 3 tantangan implementasi kebijakan yang terjadi diantaranya SDM Lembaga Pendidikan dimana dayah memiliki kekurangan guru atau pengajar, hal ini sebanding dengan tantangan kedua yaitu pendanaan yang kurang. Pengrekrutan SDM juga harus memikirkan dana untuk membayar tenaga guru (Sari, E. N., & Nurmayuli, 2023). Namun pendanaan yang lemah dayah harus menerima kekurangan SDM ini. Hal tersebut juga berefek terhadap adaptasi kurikulum pesantren mengalami kesenjangan juga merupakan efek dari minimnya SDM dayah. Dayah butuh SDM dalam mengelola kurikulum yang dapat mengintegrasikan kurikulum yang ada dengan visi misi dayah sendiri.

3. Peran Qanun Aceh dalam Penguatan Sistem Dayah

Hasil analisis menunjukkan bahwa **Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018** berperan penting dalam memberikan **landasan kelembagaan dan pembiayaan** bagi dayah. Regulasi ini mengatur mekanisme pembinaan oleh Badan Dayah Aceh, mulai dari penyaluran dana hibah, akreditasi, hingga pelatihan manajemen pendidikan.

Dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif termasuk dalam kategori **dayah takhassus**, yaitu lembaga yang berfokus pada tahfizul Qur'an dan tafsir. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dayah, pelaksanaan program tahfiz disesuaikan dengan kurikulum yang disahkan oleh BDA, dan memperoleh pengakuan resmi dalam bentuk **SK penetapan status kelembagaan**. Dengan demikian, Qanun ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga **mendorong standarisasi mutu pendidikan dayah di Aceh** (Pemerintah Aceh, 2018).

Dari sisi pelaksanaan, Qanun ini juga memberi ruang otonomi yang luas bagi dayah untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan nilai-nilai lokal. Hal ini sejalan dengan pendapat Azra (2012), bahwa otonomi pesantren merupakan ciri khas yang perlu dijaga agar lembaga tetap mandiri, tetapi tetap berada dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

Dengan adanya program takasus, dayah telah mengimplementasikan qanun Aceh dalam bagian mensejahterahkan al-qur'an dengan program menghafal dan tafsir al-quran (Zulkhairi, 2021). Program ini sebagai penguatan sistem Pendidikan

dayah dalam mendalami isi al-qur'an, diharapkan menghasilkan peserta didik menjadi insan qur'ani.

4. Sinkronisasi antara UU Pesantren dan Qanun Dayah Aceh

Temuan penelitian menunjukkan adanya **sinkronisasi substansial** antara kebijakan nasional (UU No.18/2019) dan kebijakan daerah (Qanun Aceh No.9/2018). Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu: pengakuan formal terhadap pesantren/dayah, peningkatan mutu pendidikan keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat berbasis keislaman. Namun demikian, terdapat **perbedaan implementatif**, di mana UU Pesantren bersifat nasional dan menekankan integrasi sistem pendidikan, sedangkan Qanun Aceh lebih menekankan pelestarian nilai-nilai syariat dan kearifan lokal (Husen, M., & Rusli, 2024). Hal ini menjadikan kebijakan pendidikan dayah di Aceh bersifat **sinkretik**, yaitu memadukan nilai-nilai normatif Islam dengan kebijakan negara modern (Atqia, et al., 2024; Rahmad, 2025).

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung teori **sinkronisasi kebijakan multilevel** dalam pendidikan Islam, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kesesuaian antara regulasi pusat, daerah, dan konteks lokal lembaga pendidikan (Rizqi, et al., 2025).

Sinkronisasi antara kebijakan nasional (UU Pesantren) dan daerah (Qanun Dayah Aceh) telah menciptakan model harmonisasi regulasi yang unik di Indonesia. Aceh menjadi contoh nyata bagaimana otonomi khusus dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pendidikan Islam berbasis kearifan lokal, tanpa menghilangkan relevansi dengan kebijakan pendidikan nasional (Zulkhairi, 2021).

5. Implikasi terhadap Pengembangan Pendidikan Islam

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa regulasi pendidikan dayah memberikan arah baru bagi **modernisasi pendidikan Islam di Aceh** tanpa menghilangkan identitas keislamannya. Model pengelolaan di Dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif menunjukkan bahwa penerapan kebijakan dapat berjalan efektif jika didukung oleh tiga hal utama: (1) Kepemimpinan dayah yang visioner. (2) Dukungan kebijakan daerah yang berpihak pada lembaga, dan (3) Kolaborasi antara dayah, pemerintah, dan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdullah (2020) yang menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan pesantren modern sangat dipengaruhi oleh sinergi antara nilai tradisional dan inovasi kebijakan (Riadhi, 2024). Dengan demikian, Dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif dapat dijadikan **model transformatif** bagi pengembangan dayah di Aceh dan Indonesia pada umumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi yang kuat, tetapi juga pada kesiapan lembaga dan dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya yang memadai (Usman, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan dan regulasi pendidikan dayah di Aceh, sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah, telah memberikan pengakuan dan penguatan kelembagaan yang signifikan terhadap eksistensi dayah sebagai lembaga pendidikan Islam. Dayah Zurriyatul Qur'an Al-Ma'arif menunjukkan bahwa penerapan kedua regulasi tersebut telah diimplementasikan secara bertahap melalui penguatan tata kelola lembaga, pembenahan kurikulum, dan kerja sama dengan Badan Dayah Aceh (BDA). Upaya ini menegaskan bahwa dayah di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai lembaga tradisional keagamaan, tetapi juga sebagai institusi pendidikan modern yang memiliki peran dalam dakwah, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian nilai-nilai keislaman. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa pelaksanaan kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek sumber daya manusia, pendanaan, dan adaptasi kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2020). *Pendidikan Pesantren di Era Globalisasi: Tantangan dan Adaptasi*. Deepublish.
- Andriani, N., Nurdin, A., Fitria, U., & Dinen, K. A. (2022). Integrasi Nilai Tradisional dan Modern dalam Pendidikan Dayah di Aceh. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 7(1), 45–59.
- Arianto, B. (2024). *Teknik wawancara dalam metoda penelitian kualitatif*.
- Atqia, F., Zalikha, S. N., & Marzaniar, P. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Berkualitas di Pesantren Modern Provinsi Aceh. *Risenologi*, 9(2), 59–70.
- Azhari, M., & Jailani, J. (2023). Kontribusi Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam Pengembangan Kurikulum Dayah Salafiyah Terpadu. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 4(1), 26–42.
- Azra, A. (2012). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Kencana.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. publications.
- Data, A. (2014). Teknik pengumpulan data. *Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi*, 4.
- Fardiyana, S., Lailatussaadah, L., & Nurmayuli, N. (2024). Evaluasi Program Tahfidz dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik di SD N Sibreh Aceh Besar. *Pase: Journal of Contemporary Islamic Education*, 3(1), 1–16.
- Hasanah, H. (2016). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *At-Taqaddum*, 21–46.
- Husen, M., & Rusli, M. (2024). Tantangan dan Inovasi Pendidikan Dayah Aceh

- dalam Pusaran Globalisasi dan Digitalisasi. *WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 325-336.
<https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/wathan/article/view/164>
- Juniati, R. (2023). Manajemen Pendidikan Dayah Berbasis Kearifan Lokal untuk Menjaga Tradisi Keislaman di Aceh. *Hijri*, 12(2), 277-286.
- Kementerian Hukum dan HAM. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*. Sekretariat Negara.
- Lailatussaadah, L., Jamil, A. I. B., Hayati, S., & Nurmayuli, N. (2025). Influence of family background on Islamic entrepreneurial skills among students in Aceh's Islamic Higher Education Institutions. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 389-405.
- Mirsal, I., Adnin, A. S., Sartina, K., Irwansuri, Z., Rusdi, M., Noviyani, R., & Akbar, M. A. (2025). Evaluasi Kinerja Lembaga Akreditasi Dayah di Aceh: Studi terhadap Efektivitas dan Dampaknya. *Itqan: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 16(1), 50-64.
- Pemerintah Aceh. (2018). *Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
- Rahmad, S. (2025). *Modernisasi Manajemen Pendidikan Dayah Perspektif Al-Qur'an*. (Doctoral dissertation, Universitas PTIQ Jakarta).
- Riadhi, A. (2024). *Pengembangan Masyarakat Berbasis Dayah (Studi Kasus Dayah Di Kecamatan Samalanga Bireuen Aceh)* [Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG]. <https://repository.radenintan.ac.id/35810/>
- Rizqi, R. M., Maulana, A. R., Pratama, A., & Yudra, M. D. (2025). Kebijakan Pendidikan Islam dan Kebutuhan Sosial. *PIJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(3), 263-274.
- Sari, E. N., & Nurmayuli, N. (2023). Perencanaan Full Day School Dalam Pembinaan Keagamaan Peserta Didik di SMK Negeri 5 Telkom Banda Aceh. *Intelektualita*, 12(1).
- Siregar, F., & Rahman, M. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Pesantren Pasca UU No. 18 Tahun 2019. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 101-115.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Usman, A. S. (2021). Peran dinas pendidikan dayah dalam peningkatan mutu pendidikan dayah di Aceh. , 10(01). *Intelektualita: Journal of Education Sciences and Teacher Training*, 10(01).
<https://jurnal.arraniry.ac.id/index.php/intel/article/view/10651.html>
- Zulkhairi, T. (2021). Realisasi Program Pendidikan Diniyah Formal (Pdf) Dalam Pengembangan Dayah Tradisional Di Aceh: Studi Pada Dayah Babussalam Matangkuli. *Journal Article/Edukasi*, 1(1), 1-25.